IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI JAMBI)

Dheny Wahyudhi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, dheny_wahyudhi@unja.ac.id
Sri Rahayu, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, unjasri@gmail.com

Abstract

Settlement of criminal acts through formal legal channels does not always have a positive influence on law enforcement, in many cases it is not uncommon for people to want the process to be completed outside the existing judicial system, this is because there is still an assumption that if it continues through the judicial process it is deemed unbalanced and does not reflect a sense of justice for the community, including the settlement of minor crimes. In response to this, it is deemed necessary to resolve criminal cases with a different approach by providing a balanced position between the perpetrators, victims and other parties involved either directly or indirectly as a result of a criminal act, namely the restorative justice approach. During the examination in court, the application of restorative justice has been regulated in the decision letter of the director general of the general judiciary, in which the aspect that needs to be applied in the examination of minor crimes is the existence of peace efforts between the litigants. For this reason, researchers are interested and want to see how the implementation of restorative justice in the examination of minor criminal cases (case studies in the Jambi district court)". This research is an empirical juridic research. The results of the research at the Jambi District Court found that judges have a central role in achieving peace between the parties based on the Decree of the Director General of General Courts Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 in achieving restorative justice. factors of victims, perpetrators, law enforcement officers and the community, so that in the future it is necessary to optimize the role of judges in resolving minor crimes.

Keywords: *Implementation, Restorative Justice, Minor Crime*

Intisari

Penyelesaian tindak pidana melalui jalur legal formal tidak selalu membawa pengaruh yang positif bagi penegakan hukum, dalam banyak kasus tidak jarang masyarakat menginginkan agar prosesnya di selesaikan di luar sistem peradilan yang ada hal ini dikarnakan masih ada anggapan bahwa apabila tetap dilanjutkan melalui proses peradilan dirasa tidak seimbang dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat diantaranya adalah terhadap penyelesaian terhadap tindak pidana ringan. Menyikapi hal tersebut sehingga dirasa perlu untuk menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan yang berbeda dengan memberikan posisi seimbang antara pelaku, korban dan pihak lainnya yang terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung akibat dari suatu tindak pidana yakni dengan pendekatan restorative justice. Pada pemeriksaan di pengadilan penerapan restorative justice sudah diatur dalam surat keputusan dirjen badan peradilan umum, yang mana aspek yang perlu diterapkan dalam pemeriksaan tindak pidana ringan adalah adanya upaya perdamaian antara para pihak yang berperkara. Untuk itulah peneliti tertarik dan ingin melihat bagaimana implementasi restorative justice dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan (studi kasus di pengadilan negeri Jambi)". Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Jambi diketahui bahwa hakim memiliki peran sentral dalam tercapainya perdamaian antara para pihak dengan berpedoman pada surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dalam tercapainya keadilan restorative justice tersebut tidak terlepas dari faktor korban, pelaku, aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga untuk kedepannya perlu optimalisasi peran hakim dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

Kata Kunci: Implementasi, *Restorative Justice*, Tindak Pidana Ringan

A. Pendahuluan

Berbicara mengenai kejahatan bukanlah semata-mata permasalahan abad teknologi modern sebagaimana kondisi dewasa ini. Meskipun perkembangan budaya yang semakin pesat, termasuk penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, namun permasalahan sosial seperti kejahatan tetap menjadi permasalahan yang melekat dalam kehidupan masyarakat dan akan tetap ada sampai dunia ini berakhir. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara menjatuhkan pidana.¹

Meningkatnya jumlah kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat dianggap sebagian ahli sebagai sesuatu yang biasa terjadi atau merupakan sesuatu yang alami. Beberapa ahli berpendapat "Setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang".² Peluang kejahatan tersebut ada yang terlaksana dan ada yang tidak terlaksana, terlaksana dikarenakan tidak mampu mengontrol dirinya dan tidak terlaksana dikarenakan mampu dalam mengendalikan dirinya.

Oleh karena itu, masyarakat terutama mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana senantiasa menyoroiti sistem peradilan pidana yang berlaku di negaranya, begitu juga halnya yang terjadi di Indonesia. Namun demikian proses penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dapat dilakukan di lembaga pengadilan, akan tetapi juga dapat dilakukan pada lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat.³

Dalam perkembangannya keberhasilan sistem peradilan pidana dengan menjatuhkan pidana kepada tidak serta merta membawa pengaruh yang positif bagi penegakan hukum. Dalam banyak kasus tidak jarang masyarakat menginginkan agar prosesnya di selesaikan di luar sistem peradilan untuk kasus-kasus tertentu ada sebuah anggapan bahwa seandainya tetap dilanjutkan melalui proses peradilan dirasa tidak seimbang dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat diantaranya adalah penyelesaian terhadap tindak pidana ringan.

Penanganan setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat selama ini menggunakan jalur legal formal yakni melalui peradilan pidana dalam menemukan kesalahan pelaku tindak pidana guna menentukan pidana apa yang dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan tersebut, sementara itu penyelesaian terhadap tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* mengusung falsafah integrasi yang solutif bagi mereka yang berkonflik dengan mengintegrasikan prinsip musyawarah terhadap penyelesaian perkara.⁴

Adanya pergeseran terhadap penyelesaian perkara pidana yang kalau diperhatikan masih terfokus pada perlindungan tersangka dan hak-haknya, pelaku pidana serta terpidana sehingga diperlukan kembali untuk memperhatikan aspek lain

¹ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi (Perspektif Hukum Pidana)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 5

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm 4

³ Bambang Waluyo, *Disain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 2

⁴ Lasan, Implementasi Teori Restorative Justice Mewujudkan Keadilan yang Berimbang, An Nawazil: *Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* Vol 1No 2 (2019) hlm. 55
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/nawazil/article/view/3690>

yakni korban dan masyarakat dengan porsi yang berimbang.⁵ Memperhatikan hal tersebut studi viktimologi menyajikan sebuah konsep non litigasi untuk menyelesaikan sebuah perkara pidana dalam hal ini *restorative justice*. Konsep ini menawarkan penyelesaian perkara pidana yang lebih mendamaikan demi terciptanya sebuah keadilan antara mereka yang berkonflik.⁶

Lembaga peradilan selalu menjadi sorotan dan mendapat perhatian dari masyarakat setiap menangani perkara khusus berkaitan dengan tindak pidana ringan masih ada anggapan bahwa dalam penanganan perkara sering tidak proporsional antara kerugian yang ditimbulkan dan peraturan hukum yang ada, menyikapi hal tersebut Mahkamah Agung menerbitkan sebuah peraturan mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan dendanya melalui Perma Nomor 2 Tahun 2012.

Dalam pengamatan di Pengadilan Negeri Jambi, pedoman penerapan *restorative justice* sudah diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum, yang mana aspek yang perlu diterapkan dalam pemeriksaan tindak pidana ringan adalah adanya upaya perdamaian, penetapan hakim tunggal, menghadirkan pihak keluarga pelaku dan keluarga korban dan penyelesaian pemeriksaan perkara di lakukan dengan acara pemeriksaan cepat. Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilihat bagaimana implementasi *restorative justice* dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dan apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi *restorative justice* dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan khususnya di Pengadilan Negeri Jambi.

B. Pembahasan

1. Implementasi *Restorative Justice* Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Jambi

Secara legal formal penyelesaian perkara pidana melalui proses yang sangat panjang dan harus melalui sub-sub sistem guna mencari sebuah keadilan secara sederhana dapat dijelaskan setiap sub sistem tersebut yakni sub sistem kepolisian dalam hal menerima laporan/ pengaduan dan juga tertangkap tangan selanjutnya sub sistem kejaksaan yang menyiapkan dakwaan dan tuntutan selanjutnya sub sistem pengadilan yang akan mempertimbangkan alat bukti, fakta-fakta persidangan selanjutnya menjatuhkan putusan.

Setiap proses yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi logis dalam bentuk pemidanaan, akan tetapi dalam perkembangannya tidak jarang setiap proses yang dilakukan melalui sub-sub sistem tersebut menghadirkan sebuah putusan yang menciderai rasa keadilan dalam masyarakat khususnya untuk kasus-kasus tertentu di antaranya tindak pidana ringan, sistem yang ada sekarang masih terfokus pada pelaku tindak pidana dan kurang memperhatikan kepentingan korban keluarga korban dan lingkungan masyarakat ditambah lagi ada anggapan bahwa masih terdapat praktek kecurangan di dalam pelaksanaannya.

Menanggapi hal tersebut sehingga dirasa perlu untuk menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan yang berbeda dengan memberikan posisi seimbang antara pelaku, korban dan pihak lainnya yang terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung akibat dari suatu tindak pidana yakni dengan pendekatan *restorative justice*, pendekatan ini merupakan bentuk ketidakpuasan

⁵ *Ibid*, hlm. 52

⁶ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 341-350.

masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang cenderung menekankan pada pembalasan dan tidak melibatkan korban dalam menentukan proses perkaranya.

Dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana secara legal formal ada di dalam KUHAP yang mengatur tentang beracara di pengadilan mengenai ketentuan "keterbukaan" jelas dan tegas dengan prinsip "perneriksaan sidang pengadilan terbuka untuk umum". Berbeda halnya yang ditawarkan pada *restorative justice* yang melibatkan beberapa pihak terkait dengan tindak pidana, yang menjadi permasalahan yakni bagaimana hakim dan penasihat hukum mengakomodir kepentingan setiap pihak sehingga dengan demikian tidak ada lagi yang merasa kepentingannya tidak diperhatikan.⁷

Menurut Adrianus Meliala,⁸ munculnya hukuman *restoratif* dikarenakan sistem yang ada saat ini menimbulkan banyak permasalahan. Kalau kita lihat lebih jauh lagi terhadap sistem yang ada lebih kepada penghukuman, balas dendam dan penderitaan yang diberikan kepada pelaku apalagi terhadap narapidana tersebut tidak mematuhi aturan yang ada tentu akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi, sehingga penekanannya lebih banyak tentang keamanan (*safety method*). Di sisi lain model restoratif menekankan pada resolusi konflik dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak.

Selain itu, pelaku kejahatan juga dimintai pertanggungjawaban atas kerugian akibat perbuatannya. Pengaplikasiannya tidak mudah, jika hanya diterapkan di lingkungan lapas maka hasilnya tidak akan maksimal. Oleh karena itu model pemulihan harus dimulai terlebih dahulu oleh pihak kepolisian dan kemudian melakukan penyelidikan begitu juga untuk tahap selanjutnya kejaksaan dan pengadilan. Hal yang harus juga mendapat perhatian adalah bagaimana memulihkan penderitaan korban secara fisik dan psikis kerugian materil bisa diganti oleh pelaku, permasalahannya adalah penderitaan psikologis misalnya dalam kasus KDRT.

Mediasi bukanlah cara baru untuk menyelesaikan sengketa di Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai suku dengan kebiasaan, bahasa, dan cara penyelesaian sengketa yang berbeda, Indonesia memiliki persamaan dasar untuk menyelesaikan semua jenis sengketa public dan privat, yaitu mekanisme musyawarah dan mekanisme mufakat. Inti dari mekanisme ini sama dengan mediasi, dalam mediasi ini para pihak berkompomi untuk mencapai dasar bersama yang menguntungkan semua pihak hingga tercapai kesepakatan.⁹

Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mendukung penuh upaya kembali kebudayaan asli Indonesia dan menyelesaikan sengketa melalui musyawarah tanpa harus ke pengadilan.¹⁰ Adapun yang perlu dilakukan saat ini adalah merivitalisasi mekanisme review agar publik memiliki kepercayaan untuk menyelesaikan sendiri perselisihan. Mediasi sangat cocok untuk budaya Indonesia, terutama untuk menyelesaikan perselisihan keluarga yang masih menjaga keharmonisan dan privasi, sehingga cocok untuk mediasi. Dengan

⁷Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas*, Jurnal Hukum, hlm. 21 <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1437>

⁸<http://www.hukumonline.com/detail.com/detail.asp?id=9768&cl=> Diakses 10 Februari 2021

⁹DS. Dewi, dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, hlm. 70.

¹⁰Bagir Manan, "Perlu Ada Pendamai di Luar Pengadilan", *Media Indonesia*, diakses pada tanggal 18 September 2002

berbagai keunggulan, mediasi diharapkan dapat menjadi metode alternatif penyelesaian sengketa yang efektif di Indonesia.

Mediasi memiliki peluang yang besar untuk dapat berkembang di Indonesia. Menurut adat istiadat timur yang mengakar, masyarakat memprioritaskan menjaga hubungan persahabatan antara keluarga atau mitra bisnis, daripada menjaga keuntungan sementara jika terjadi perselisihan. Sekalipun dapat keuntungan dari penyelesaian perselisihan di pengadilan, tetapi hubungan pribadi juga akan rusak. Menjaga nama seseorang adalah hal penting terkadang lebih utama dari proses penyelesaian sengketa itu sendiri.¹¹

Dalam hal penegakan hukum dan penyelesaian perkara dengan menggunakan prinsip *restorative justice* yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang dalam pelaksanaannya masih belum optimal.

Memperhatikan hal tersebut pada pemeriksaan di tingkat pengadilan para pihak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya melalui model "pertemuan" yang harmonis. Oleh karena itu hakim dituntut untuk menggunakan strategi yang atau mengatur penyelesaian perkara pidana dengan memilih dan memberikan model alternatif yang sesuai.¹² Dalam praktik selama ini penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan normatif dengan melihat jenis kejahatan yang dilakukan akibat yang ditimbulkan dan kurang memperhatikan aspek perlindungan terhadap korban sementara keadilan restoratif menitikberatkan pada korban karena adanya kesalahan pelaku dalam arti kata keadilan restoratif mengutamakan dialog antara korban dengan pelaku dan antar pihak terkait lainnya.¹³

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan peradilan umum dalam menangani perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi pelaksanaan *restorative justice* sehingga tidak lagi terfokus pada pembedaan.

Perubahan dalam penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak baik itu korban/keluarga, pelaku/keluarga dan pihak lainnya yang terkait secara bersama-sama untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang berimbang bagi semua pihak dengan mengembalikan keadaan seperti semula dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Jambi berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dalam ketentuan ini disebutkan bahwa perkara tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah perkara pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan

¹¹DS.Dewi, dan Fatahillah A. Syukur, *Op.Cit*, hlm. 71.

¹²*Ibid*

¹³Tajudin dan Nela Sumika Putri, *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan*, PJIH Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law Vol 2 No. 1 2015 hlm. 149 <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7178/3345>

pelimpahan berkas berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif.

Pada waktu pelimpahan perkara baik itu perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait pada saat hari sidang, Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara seperti ketentuan di atas. Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1x24 jam) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur Pasal 205–210 KUHAP.

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.

Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban. Selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, ditandatangani oleh terdakwa, korban, pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusannya. Keadilan restoratif tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang berulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian bahwa implementasi atau penerapan peraturan *restorative justice* sudah berjalan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang menekankan peranan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi *Restorative Justice* Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Jambi

Penanganan perkara tindak pidana ringan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat, salah satu kasus di mana keadilan restoratif dapat digunakan adalah terkait dengan pencurian ringan yang sering mendapat perhatian publik karena dianggap perlakuannya tidak lagi proporsional antara jenis kejahatan dan akibat yang harus diterima, adanya ketimpangan dalam menciptakan keadilan yang objek barang yang kurang memiliki nilai ekonomis. Dalam hal penyesuaian nilai objek barang tersebut Mahkamah Agung Mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pada tanggal 27 Februari 2012 yang mengatur batasan dan denda tindak pidana ringan dalam hukum pidana (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA mengatur bahwa Pasal 364 KUHP (pencurian ringan); Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan); Pasal 379 KUHP (penipuan ringan); dan Pasal 384 KUHP (keuntungan dan penipuan); Pasal 407 KUHP (pengrusakan ringan); dan Pasal 482 KUHP (penadahan ringan); dengan nilai kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Ketua Pengadilan segera menunjuk dan menetapkan hakim tunggal untuk

memproses, memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan hukum acara pemeriksaan cepat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana dimulai dari Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHP.

Penjatuhan pidana dalam perkara pidana ringan, tidaklah cukup hanya dikenakan terhadap perbuatan pelaku yang hanya bertentangan dengan hukum, atau bersifat melawan hukum serta memenuhi rumusan delik dalam suatu undang-undang saja, akan tetapi hal tersebut masih perlu adanya syarat-syarat lain yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).¹⁴

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif adalah pemulihan keadaan akibat dari suatu tindak pidana orientasinya tidak lagi pada pembalasan akan tetapi adanya pemberian hak yang seimbang antara mereka yang berkonflik baik korban maupun pelaku atau masyarakat yang terkena dampak baik secara langsung maupun secara tidak langsung akibat dari tindak pidana.

Dalam hal implementasi *restorative justice* di Pengadilan Negeri Jambi setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapannya yakni:

- a. Faktor korban
- b. Faktor pelaku
- c. Faktor aparat penegak hukum
- d. Faktor masyarakat

Faktor korban, dalam terjadinya suatu tindak pidana korban adalah pihak yang merasakan langsung kerugian yang dialami akibat dari suatu tindak pidana, sering kali dalam pelaksanaan keadilan *restorative justice* pihak korban tidak mau memaafkan pelaku dan menginginkan agar tindak pidana yang dialaminya tetap dilanjutkan sampai pada putusan pengadilan, dengan alasan memberikan efek jera kepada pelaku sekalipun kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tersebut nilai ekonominya tidak terlalu tinggi. Sementara dalam mewujudkan keadilan restoratif di pengadilan pemaafan korban sangat tinggi nilainya agar suatu perkara dapat diselesaikan secara *restorative justice*. Seringkali ganti kerugian yang diminta oleh korban kepada pelaku melebihi dari kerugian yang telah ditimbulkannya sehingga perdamaian sulit tercapai.

Faktor pelaku, permasalahan lainnya yang menyebabkan sulitnya penerapan *restorative justice* disebabkan karena pelaku merupakan residivis yang sering keluar masuk penjara, sementara kita ketahui bahwa salah satu syarat untuk dapat diterapkan keadilan *restorative justice* adalah pelaku bukan merupakan residivis. Di samping itu pelaku tindak pidana kurang aktif dalam menunjukkan penyesalan terhadap perbuatan yang telah ditimbulkannya sehingga tidak bisa menarik simpatik korban untuk memaafkan perbuatannya.

Faktor penegak hukum, demi mewujudkan keadilan restoratif di pengadilan hakim harus berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* yang menjadi pegangan dan pedoman bagi hakim dilingkungan peradilan umum dalam menangani perkara dengan pendekatan *restorative justice*, di samping itu

¹⁴Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Cv. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 7

keaktivitas hakim dalam menengahi para pihak sangat diperlukan agar keadilan *restorative justice* dapat diwujudkan.

Faktor masyarakat, pelaksanaan *restorative justice* tidak terlepas dari dukungan dari masyarakat itu sendiri di mana tindak pidana itu terjadi, masyarakat secara langsung maupun tidak langsung yang terkena dampak dari suatu tindak pidana, dengan adanya dukungan dari masyarakat mempermudah pelaksanaan dari *restorative justice*. Permasalahan lain yang sering muncul adalah kurang adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri karena masih menganggap bahwa penjara sebagai salah satu solusi dalam memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana sehingga pelaksanaan *restorative justice* sulit terlaksana.

Agar keadilan *restorative justice* dapat terwujud pelaksanaannya di tingkat pengadilan setidaknya ada empat faktor yang harus saling mendukung dan saling mempengaruhi antara faktor satu dengan faktor yang lainnya, apabila salah satu faktor tidak mendukung maka sulit untuk mencapai keadilan *restorative justice* khususnya di tingkat pengadilan.

Sementara berkaitan dengan empat faktor tersebut dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jambi keempat faktor tersebut sudah sesuai dengan tujuan *restorative justice* sudah ada keseimbangan dan saling mendukung.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Implementasi *restorative justice* dalam pemeriksaan pidana ringan di tingkat Pengadilan Negeri Jambi merujuk pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 di mana peran hakim sangat sentral dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Adapun faktor yang mempengaruhi yakni faktor korban, pelaku, aparat penegak hukum dan masyarakat sudah seimbang dan saling mendukung dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

2. Saran

Perlu optimalisasi atau peningkatan peran hakim atau penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana ringan dengan pendekatan *restorative justice*.

D. Daftar Pustaka

- Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 2017, *Disain Fungsi Kejaksaaan Pada Restorative Justice*, PT Raja Grafindo Persada, Depok
- DS. Dewi, dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*
- Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Cv. Jakad Media Publishing, Surabaya
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama

Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi (Perspektif Hukum Pidana)*
Sinar Grafika, Jakarta

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem
Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Al'ad/* ISSN: 24770124, Vol 10, No
2 (2018) <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362>

Tajudin dan Nela Sumika Putri, *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui
Pendekatan Restorative Justice Sebagai dasar Penghentian Penyidikan dan
Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan*, PJIH Padjadjaran Jurnal
Ilmu Hukum Journal of Law Vol 2 No. 1 2015 hlm. 149
<http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7178/3345>

Lasan, *Implementasi Teori Restorative Justice Mewujudkan Keadilan yang Berimbang*
, An Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Vol 1No 2 (2019)
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/nawazil/article/view/3690>

Yuniar Ariefianto, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Lalu
Lintas*, Jurnal Hukum
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1437>

Bagir Manan, "Perlu Ada Pendamai di Luar Pengadilan", *Media Indonesia*, diakses
pada tanggal 18 September 2002

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan
dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative
Justice) pada 22 Desember 2020

[http:// www.hukumonline.com / detail.com / detail.asp?id=9768&cl=](http://www.hukumonline.com/detail.com/detail.asp?id=9768&cl=) Diakses 10
Februari 2021

[http://infokorupsi.com/id/opinion.php?ac=304&l=keadilan-restoratif,](http://infokorupsi.com/id/opinion.php?ac=304&l=keadilan-restoratif) Diakses 11
Februari 2021